

Hubungan Belanja Modal dan Transfer ke Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah: *Literature Review*

Ketut Agustina Febrian¹, Made Aristia Prayudi², Putu Yunartha Pradnyana Putra³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha
agustina.febrian@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun, rendahnya kontribusi PAD dan dominasi dana transfer masih menjadi permasalahan utama di banyak daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan belanja modal dan transfer ke daerah dengan kemandirian keuangan daerah melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan terhadap 10 artikel dari jurnal nasional terakreditasi periode 2020-2025 yang diperoleh melalui Google Scholar. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa belanja modal umumnya memiliki hubungan yang lemah atau cenderung negatif dengan kemandirian keuangan daerah, terutama ketika alokasinya bersifat konsumtif dan belum mampu meningkatkan PAD. Sementara itu, transfer ke daerah secara umum menunjukkan hubungan negatif dengan kemandirian keuangan daerah akibat tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Kata kunci: *Belanja Modal, Transfer ke Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah*

Abstract

Regional autonomy requires local governments to increase financial independence to reduce dependence on the central government. However, low regional revenue contributions and the dominance of transfer funds remain major problems in many regions in Indonesia. This study aims to examine the relationship between capital expenditure and regional transfers with regional financial independence through a literature review approach. This study was conducted on 10 articles from accredited national journals for the 2020-2025 period obtained through Google Scholar. The review results indicate that capital expenditure generally has a weak or negative relationship with regional financial independence, especially when the allocation is consumptive and has not been able to increase locally-generated revenue. Meanwhile, regional transfers generally show a negative relationship with regional financial independence due to high fiscal dependence on the central government.

Keywords : *Capital Expenditure, Transfer to Regions, Regional Financial Independence*

LATAR BELAKANG

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, didefinisikan sebagai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan bagian dari pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta pembangunannya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yudiastuti et al., 2025). Desentralisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan dan potensi wilayahnya masing-masing. Dalam konteks ini, otonomi daerah diharapkan mampu mendorong daerah agar lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah serta mengelola anggaran secara optimal tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi otonomi daerah sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Shoba & Fidiana (2022) bahwa kemandirian keuangan daerah menjadi aspek krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Kemandirian keuangan umumnya dikaitkan dengan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen utama pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Sebaliknya, dominasi dana transfer dari pemerintah pusat sering kali dipandang sebagai indikator rendahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sebaliknya, dominasi dana transfer dari pemerintah pusat sering kali dipandang sebagai indikator rendahnya kemandirian keuangan daerah, karena mencerminkan keterbatasan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Kondisi tersebut dapat berdampak pada terbatasnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, serta berpotensi menurunkan akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kemandirian keuangannya. Menurut sstruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), kontribusi PAD hanya sekitar 28,7% sedangkan transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar 65,7% terhadap pendapatan daerah (Kementerian Keuangan, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat

bergantung pada kebijakan transfer fiskal nasional. Ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai implikasi, antara lain terbatasnya inovasi daerah dalam menggali potensi pendapatan, kerentanan terhadap perubahan kebijakan fiskal, serta terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Dalam kerangka keuangan daerah, belanja modal dan transfer ke daerah merupakan dua instrumen fiskal yang memiliki keterkaitan erat dengan kemandirian keuangan daerah. Belanja modal merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur dan aset produktif yang memberikan manfaat jangka panjang. Secara teoritis, belanja modal yang dikelola secara efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas basis pajak, dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Sementara itu, transfer ke daerah merupakan instrumen pemerataan fiskal untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik dasar. Selain itu, kualitas perencanaan dan ketepatan alokasi belanja modal juga menentukan sejauh mana investasi publik tersebut mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian lokal. Dalam praktiknya, tidak semua belanja modal memberikan dampak optimal apabila tidak didukung oleh pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran. Sementara itu, transfer ke daerah merupakan instrumen pemerataan fiskal untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik dasar. Transfer ini juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Meskipun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat berpotensi menghambat upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah.

Namun demikian, hubungan antara belanja modal, transfer ke daerah, dan kemandirian keuangan daerah tidak menunjukkan pola yang seragam dalam berbagai penelitian terdahulu. Sejumlah studi menunjukkan bahwa belanja modal berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, sementara penelitian lainnya menemukan hasil yang berlawanan atau tidak signifikan akibat rendahnya efektivitas pelaksanaan dan kurang tepatnya prioritas alokasi anggaran. Hal serupa juga terjadi pada kajian mengenai transfer ke daerah, di mana sebagian literatur menilai transfer sebagai pendukung kapasitas fiskal daerah karena mampu menutup kesenjangan fiskal dan meningkatkan pelayanan publik, sedangkan studi lain menyoroti perannya dalam memperkuat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, khususnya ketika pemerintah daerah tidak diiringi dengan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, perbedaan metode analisis, periode pengamatan, serta karakteristik ekonomi dan kelembagaan masing-masing daerah turut memengaruhi variasi hasil penelitian yang ditemukan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga tidak dapat digeneralisasi secara sederhana tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik setiap daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian yang mampu mensintesis dan memetakan hasil-hasil penelitian terdahulu secara komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini disusun menggunakan pendekatan literature review untuk menelaah hubungan belanja modal dan transfer ke daerah dengan kemandirian keuangan daerah. Melalui peninjauan sistematis

terhadap literatur yang relevan, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai pola hubungan yang terbentuk, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian dan implikasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literature review, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan mengumpulkan, merangkum, dan menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya serta pandangan para ahli yang disajikan dalam berbagai publikasi ilmiah (Rahman et al., 2023). Proses identifikasi dan pemilihan literatur dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penentuan masalah penelitian, penelusuran sumber pustaka, seleksi artikel yang relevan, hingga analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada topik kemandirian keuangan daerah, hubungannya dengan belanja modal, serta hubungan transfer ke daerah dengan kemandirian keuangan daerah.

Pencarian artikel dilakukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “belanja modal dalam kemandirian keuangan daerah” dan “transfer ke daerah dalam kemandirian keuangan daerah”. Dari pencarian awal, diperoleh 29.400 artikel untuk kata kunci pertama dan 26.300 artikel untuk kata kunci kedua. Selanjutnya, dilakukan penyaringan berdasarkan kesesuaian topik dengan kemandirian keuangan daerah dan hubungannya dengan belanja modal serta dana transfer. Sehingga setelah proses seleksi, diperoleh 10 artikel dari jurnal nasional yang terbit pada periode 2020-2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 10 artikel yang bersumber dari Google Scholar yakni jurnal nasional terakreditasi yang dianalisis dan dirangkum secara sistematis dalam bentuk tinjauan literatur. Tabel berikut memuat artikel-artikel terpilih yang menjadi objek kajian, meliputi judul artikel, penulis, tahun publikasi, serta temuan utama yang relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 1. Hasil Literature Review

No.	Nama Penulis	Temuan Utama
1.	Oktavia & Handayani (2021)	Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut mencerminkan bahwa peningkatan belanja modal belum mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah karena alokasinya cenderung konsumtif dan tidak merata antar wilayah, sehingga belum berfungsi optimal dalam mendorong kemandirian keuangan daerah.
2.	Saraswati & Nurharjanti (2021)	Belanja modal tidak berhubungan signifikan dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, karena kenaikan belanja modal tidak selalu diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. kondisi ini disebabkan oleh alokasi belanja modal yang kurang tepat sasaran,

		bersifat konsumtif, serta realisasi anggaran yang tidak optimal, sehingga menurunkan produktivitas belanja dan meningkatkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
3.	Almas (2022)	Belanja modal tidak berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini terjadi karena alokasi belanja modal di daerah tertinggal belum dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pembangunan sarana dan prasarana yang produktif, sehingga tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang mampu memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.
4.	Ardiansyah (2023)	Dana transfer ke daerah, khususnya dana perimbangan, memiliki hubungan negatif dengan kemandirian keuangan daerah. Hubungan negatif ini mencerminkan bahwa semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer sebagai sumber pembiayaan eksternal untuk menutup defisit anggaran, semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian fiskal baru dapat meningkat apabila kontribusi PAD lebih dominan dibandingkan dana transfer yang diterima.
5.	Abdulfatah Totoh & Mulyani (2024)	Belanja modal tidak memiliki hubungan signifikan dengan kemandirian keuangan daerah. peningkatan belanja modal tidak selalu diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik belum tentu memberikan dampak langsung terhadap penerimaan daerah, melainkan dapat menambah beban pengeluaran pemerintah. Selain itu, belanja modal yang dialokasikan pada aset kurang produktif dan tidak dikelola secara optimal berpotensi menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah.
6.	Urfah (2024)	Transfer ke daerah menunjukkan bahwa transfer ke daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Besarnya porsi dana transfer yang diterima pemerintah daerah belum mampu meningkatkan kemandirian fiskal, yang mengindikasikan bahwa dana tersebut belum dikelola secara optimal untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah.
7.	Anisa Mulyandani (2025)	Belanja modal tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah karena aset yang dihasilkan belum mampu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023 juga menunjukkan bahwa porsi belanja modal relatif lebih

		kecil dibandingkan jenis belanja lainnya, yang mengindikasikan rendahnya fokus pemerintah daerah dalam mengarahkan belanja modal sebagai instrumen peningkatan pendpaatan dan pengurangan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
8.	Maharani & Haryanto (2025)	Transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, semakin rendah kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi faktor kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
9.	Torry et al., (2025)	Dana transfer dari pemerintah pusat berhubungan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, tak terkecuali di Desa Busungbiu. Tingkat kemandirian keuangan desa yang sangat rendah, disertai tingginya ketergantungan pada dana transfer, menunjukkan bahwa dominasi transfer ke daerah berkontribusi terhadap lemahnya peran PADes dalam struktur pendapatan.
10.	Pramesti (2025)	Tranfer ke daerah memiliki keterkaitan dengan penurunan kemandirian keuangan daerah, hal tersebut ditunjukkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berhubungan negatif dengan kemandirian keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat cenderung mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menggali sumber PAD. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kemandirian keuangan daerah memerlukan strategi penguatan PAD serta pengelolaan dana transfer yang lebih efektif dan berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal.

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2026

Hubungan belanja modal dengan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Handayani (2021), Saraswati & Nurharjanti (2021), Almas (2022), Abdulfatah Totoh & Mulyani (2024), dan Urfah (2024) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negative atau bahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah belum berjalan optimal, terutama karena alokasi belanja modal cenderung bersifat konsumtif, kurang tepat

sasaran, dan belum difokuskan pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dalam beberapa kasus, belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembangunan yang tidak secara langsung menghasilkan penerimaan daerah, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kemandirian fiskal menjadi terbatas. Kondisi ini juga diperparah oleh lemahnya perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan prioritas daerah serta kurangnya integrasi antara program pembangunan dan strategi peningkatan pendapatan

Selain itu, efektivitas belanja modal juga dipengaruhi oleh ketidakmerataan antar wilayah, rendahnya kualitas pengelolaan asset daerah, serta keterbatasan dampak jangka pendek pembangunan infrastruktur terhadap penerimaan daerah. Kondisi ini mengakibatkan belanja modal belum mampu berfungsi optimal sebagai instrumen penguatan kemandirian keuangan daerah dan justru berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap dana transfer. Meskipun demikian, terdapat hasil kajian literatur yang menunjukkan adanya inkonsistensi temuan antar peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022), menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah di mana penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Dian & Suryanti (2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh belanja modal sangat bergantung pada kualitas implementasi dan orientasi penggunaannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, secara umum transfer ke daerah menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari temuan penelitian oleh Anisa & Mulyandani (2025), Maharani & Haryanto (2025), Torry et al., (2025), Pramesti (2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya porsi dana transfer seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil cenderung memperkuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan melemahkan potensi untuk menggali sendiri sumber pendapatan asli daerahnya. Ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer mencerminkan bahwa masih rendahnya peran PAD dalam struktur pendapatan. Selain itu, dana transfer sering kali digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai belanja rutin, bukan diarahkan secara strategis untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pola penggunaan seperti ini berpotensi menciptakan keadaan di mana pemerintah daerah menjadi kurang terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Akibatnya, meskipun transfer ke daerah berperan penting dalam pemerataan fiskal, dominasinya justru berpotensi menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah. Namun demikian, hasil kajian literatur juga menunjukkan adanya inkonsistensi temuan antar peneliti, seperti temuan penelitian yang dilakukan oleh Urfah (2024) yang menunjukkan bahwa transfer ke daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, yang menandakan bahwa pengaruh transfer ke daerah terhadap kemandirian keuangan sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola dana transfer, mengoptimalkan PAD, serta karakteristik ekonomi dan fiskal masing-masing wilayah. Dengan kata lain, dana transfer dapat menjadi instrumen yang

mendukung maupun menghambat kemandirian keuangan tergantung pada kualitas pengelolaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayudi et al., (2021) menunjukkan bahwa desain otoritas anggaran berpengaruh signifikan terhadap munculnya kelonggaran anggaran di sektor publik. Pemberian otoritas akhir kepada bawahan terbukti mampu menekan perilaku slack dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dalam konteks kemandirian keuangan daerah, temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas belanja modal dan optimalisasi dana transfer tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola penganggaran. Sistem pengendalian internal, transparansi, serta akuntabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa anggaran yang digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Belanja modal dan transfer ke daerah yang dikelola secara efisien dan bebas dari slack berpotensi lebih besar dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Meskipun demikian, literatur yang ada menunjukkan adanya perbedaan dan inkonsistensi hasil penelitian, di mana sebagian studi menemukan bahwa belanja modal dan transfer ke daerah dapat mendukung kemandirian keuangan apabila dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), khususnya terkait variasi karakteristik daerah, efektivitas pengelolaan anggaran, serta perbedaan periode dan metode penelitian yang digunakan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat, serta kapasitas institusional daerah juga turut memengaruhi hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan kajian literature review yang komprehensif untuk mensintesis berbagai temuan empiris dan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan belanja modal dan transfer ke daerah dengan kemandirian keuangan daerah, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis literatur, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara belanja modal dan transfer ke daerah dengan kemandirian keuangan daerah belum menunjukkan pola yang konsisten, namun secara umum ditemukan bahwa belanja modal cenderung memiliki hubungan yang lemah terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, terutama ketika alokasinya belum efektif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, transfer ke daerah lebih sering menunjukkan hubungan negatif karena tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya mengurangi insentif untuk mengoptimalkan sumber pendapatan lokal. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan belanja dan optimalisasi penggunaan dana transfer menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Implikasinya, pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja modal pada sektor produktif yang mampu meningkatkan basis pendapatan, serta mengelola dana transfer secara lebih strategis agar tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan mempertimbangkan variabel kontekstual seperti karakteristik ekonomi daerah dan kualitas tata kelola fiskal guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfatah, T., & Mulyani, S. (2024). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 694–701. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Almas, A. B. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2021). Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Angin, P. G. B. P.-. (2024). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA PEGAWAI, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2021). UNIVERSITAS TIDAR.
- Anisa, P., & Mulyandani, V. C. (2025). Pengaruh Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023. 5(3), 295–309.
- Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Riyans Ardiansyah Universitas Borneo Tarakan , Indonesia 1 . PENDAHULUAN Undang-Undang No . 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Menyatakan Bahwa Daerah Diberik. 4(1), 92–106.
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1–20. <https://Ejournal.Stiejb.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Kritis/Article/View/177>
- Bahtiar, S. (2024). General Allocation Fund (DAU) and Regional Fiscal Independence: Finding a Balance Point in Central-Regional Relations. *Journal of Management*, 3(2 SE-Articles), 821–835. <https://myjournal.or.id/index.php/JOM/article/view/341>
- Darmayanti, N. L. W., & Sulindawati, N. L. G. E. (2025). Fenomena Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Desa : Studi Kasus di Desa Pakisan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 15(1), 116–128. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/92482>

- Debora, D., Kantohe, M., Tarore, S. V., & Rantung, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. 5(2), 123–129.
- Desiantini, K. K., & Prayudi, M. A. (2021). Faktor-Faktor Penentu Kualitas Penyerapan Anggaran Dana Desa. 9(1), 60–68.
- Luh, N., Silviani, P. D., Made, I., & Adiputra, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Budget Ratcheting Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Bali). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 152–163.
- Maharani, Z. P., & Haryanto, H. (2025). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018-2023). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 14(3).
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Paranata, A. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia. *Heliyon*, 8(10), e11153. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153>.
- Pramesti, I. O. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Prayudi, M. A., Suadnyana, N., Gede, P. I., & Pertama, A. (2021). Giving The Authority To Subordinates : Does Budget Participation Really Affect Budgetary Slack In Public Sector ? 197(Teams), 318–321.
- Rahman, A., Altin, D., Belitung, B., & Belitung, U. B. (2023). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*. Xxx(1), 104–116. https://Jubi.Id/Domberai/2025/Bpk-Ungkap-Dugaan-Penyelewengan-Miliaran-Rupiah-Di-Pemprov-Papua-Barat-Daya/#Google_Vignette
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 2, 51–64.
- Salsabela, A. H., & Darmawan. (2024). Optimalisasi Desentralisasi Fiskal: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 551–564.

- Savitri, K. (2023). Pengaruh Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Shoba, A. N., & Fidiana. (2022). Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(5), 107–122. <https://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/4532>
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Suandani, K. P., & Astawa, G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614–1930.
- Torry, K., Dwijayanti, P., & Diatmika, I. P. G. (2025). Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal , Kemandirian Keuangan , Serta Ketergantungan Keuangan Daerah Di Desa Busungbiu , Kecamatan Busungbiu. 14(3), 217–227.
- Urfah, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Transfer Ke Daerah (TKD) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus SIKD Kota Batu Tahun 2014-2023). <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/67228>
- Utami, A. F. N. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.
- Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JAFM: Journal Of Accounting And Finance Management*, Vol. 6
- Yuliani, M. R., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Di BPKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(02), 276–286.